

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2017 DI KECAMATAN SEMBAWA, KABUPATEN BANYUASIN**



Skripsi Oleh :

Rizki Salsabila

01031181520003

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2017 DI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN**

Disusun oleh:

Nama : Rizki Salsabila
NIM : 01031181520003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 1 Agustus 2019

Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak

NIP. 195808281988101001

Anggota



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198207032014042001

Anggota



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196607041992031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2017 DI KECAMATAN SEMBAWA, KABUPATEN BANYUASIN**

Disusun oleh:

Nama : Rizki Salsabila

NIM : 01031181520003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 15 Juli 2019


Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP.195808281988101001
Anggota

Tanggal : 16 Juli 2019


Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207032014042001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Nama : Rizki Salsabila

NIM : 01031181520003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak

Anggota : Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 1 Agustus 2019

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 1 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan



Rizki Salsabila

NIM 01031181520003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin” dengan tepat waktu dan penuh perjuangan manis yang tidak akan pernah terlupakan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat wajib yang harus ditempuh dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), serta pembuatan skripsi ini juga memberikan banyak manfaat kepada penulis. Skripsi ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk tujuan perbaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 1 Agustus 2019



Rizki Salsabila

NIM. 01031181520003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I_ PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Penelitian	1
1.2.	Rumusan Masalah	6
1.3.	Tujuan Penelitian	7
1.4.	Manfaat Penelitian	7
1.5.	Metodologi Penelitian	7
1.5.1.	Objek Penelitian	7
1.5.2.	Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.3.	Rancangan Penelitian	9
1.5.4.	Jenis dan Sumber Data	9
1.5.5.	Teknik Pengumpulan Data	10

1.5.6.	Teknik Analisis Data.....	11
1.6.	Sistematika Penulisan.....	14

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

2.1.	Landasan Teori.....	16
2.1.1.	Teori <i>Stewardship</i>	16
2.1.2.	Desa dan Pemerintahan Desa.....	17
2.1.3.	Konsep Akuntabilitas.....	19
2.1.3.1.	Pengertian Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik.....	19
2.1.3.2.	Aspek Akuntabilitas.....	21
2.1.3.3.	Dimensi Akuntabilitas.....	23
2.1.3.4.	Indikator Akuntabilitas.....	26
2.1.4.	Dana Desa (DD).....	29
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	34
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA

3.1.	Gambaran Umum Desa Lalang Sembawa.....	43
3.1.1.	Gambaran Umum Wilayah.....	43
3.1.2.	Visi dan Misi.....	44
3.1.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lalang Sembawa.....	45
3.1.4.	Program Kegiatan Dana Desa Lalang Sembawa.....	47
3.2.	Gambaran Umum Desa Limbang Mulya.....	48
3.2.1.	Gambaran Umum Wilayah.....	48
3.2.2.	Visi dan Misi.....	49
3.2.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Limbang Mulya.....	50
3.2.4.	Program Kegiatan Dana Desa Limbang Mulya.....	51
3.3.	Gambaran Umum Desa Pulau Muning.....	52
3.3.1.	Gambaran Umum Wilayah.....	52
3.3.2.	Visi dan Misi.....	54

3.3.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Muning.....	55
3.3.4.	Program Kegiatan Dana Desa Pulau Muning	56
3.4.	Gambaran Umum Desa Purwosari	57
3.4.1.	Gambaran Umum Wilayah.....	57
3.4.2.	Visi dan Misi	57
3.4.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwosari	59
3.4.4.	Program Kegiatan Dana Desa Purwosari	59
3.5.	Gambaran Umum Desa Santansari.....	60
3.5.1.	Gambaran Umum Wilayah.....	60
3.5.2.	Visi dan Misi	61
3.5.3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Santansari	62
3.5.4.	Program Kegiatan Dana Desa Santansari.....	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Hasil Penelitian	66
4.1.1.	Desa Lalang Sembawa	66
4.1.1.1.	Akuntabilitas.....	66
4.1.1.2.	Pengelolaan Dana Desa	69
4.1.2.	Desa Limbang Mulya	73
4.1.2.1.	Akuntabilitas.....	73
4.1.2.2.	Pengelolaan Dana Desa	76
4.1.3.	Desa Pulau Muning	80
4.1.3.1.	Akuntabilitas.....	80
4.1.3.2.	Pengelolaan Dana Desa	83
4.1.4.	Desa Purwosari.....	87
4.1.4.1.	Akuntabilitas.....	87
4.1.4.2.	Pengelolaan Dana Desa	89
4.1.5.	Desa Santansari	92
4.1.5.1.	Akuntabilitas.....	92
4.1.5.2.	Pengelolaan Dana Desa	95

4.2.	Pembahasan.....	99
4.2.1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Lalang Sembawa.....	99
4.2.2.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Limbang Mulya	102
4.2.3.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Muning.....	105
4.2.4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Purwosari	107
4.2.5.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Santansari.....	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	114
5.2.	Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	121
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pagu Dana Desa Tahun 2017	3
Tabel 1.2. Laporan Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017- Triwulan I 2018.....	4
Tabel 2.1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	32
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1. Program Kegiatan Dana Desa Lalang Sembawa	47
Tabel 3.2. Program Kegiatan Dana Desa Limbang Mulya	52
Tabel 3.3. Program Kegiatan Dana Desa Pulau Muning	56
Tabel 3.4. Program Kegiatan Dana Desa Purwosari.....	60
Tabel 3.5. Program Kegiatan Dana Desa Santansari	64
Tabel 4.1. Realisasi Program Kegiatan Dana Desa Lalang Sembawa.....	100
Tabel 4.2. Realisasi Program Kegiatan Dana Desa Limbang Mulya.....	102
Tabel 4.3. Realisasi Program Kegiatan Dana Desa Pulau Muning.....	105
Tabel 4.4. Realisasi Program Kegiatan Dana Desa Purwosari	107
Tabel 4.5. Realisasi Program Kegiatan Dana Desa Santansari.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	42
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa Lalang Sembawa	46
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Desa Limbang Mulya.....	51
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Desa Pulau Muning.....	55
Gambar 3.4. Struktur Organisasi Desa Purwosari	59
Gambar 3.5. Struktur Organisasi Desa Santansari	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Desa Lalang Sembawa.
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Desa Limbang Mulya.
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Desa Pulau Muning.
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Desa Purwosari.
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Desa Santansari.
- Lampiran 6 Daftar Hadir Musyawarah Desa Lalang Sembawa.
- Lampiran 7 Daftar Hadir Musyawarah Desa Limbang Mulya.
- Lampiran 8 Daftar Hadir Musyawarah Desa Pulau Muning.
- Lampiran 9 Daftar Hadir Musyawarah Desa Purwosari.
- Lampiran 10 Daftar Hadir Musyawarah Desa Santansari.
- Lampiran 11 Papan Informasi Desa Lalang Sembawa.
- Lampiran 12 Papan Informasi Desa Limbang Mulya.
- Lampiran 13 Papan Informasi Desa Pulau Muning.
- Lampiran 14 Papan Informasi Desa Purwosari.
- Lampiran 15 Laporan Realisasi APBDesa bersumber Dana Desa Lalang Sembawa.
- Lampiran 16 Laporan Realisasi APBDesa bersumber Dana Desa Limbang Mulya.
- Lampiran 17 Laporan Realisasi APBDesa bersumber Dana Desa Pulau Muning.
- Lampiran 18 Laporan Realisasi APBDesa bersumber Dana Desa Purwosari.
- Lampiran 19 Laporan Realisasi APBDesa bersumber Dana Desa Santansari.
- Lampiran 20 Rencana Anggaran Biaya Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Santansari

Lampiran 21 Lembaran Evaluasi RKPDesa dan APBDesa Santansari

Lampiran 22 Foto Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Desa Santansari

Lampiran 23 Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Lalang Sembawa

Lampiran 24 Foto Siring Jalan Desa Lalang Sembawa

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DI KECAMATAN SEMBAWA, KABUPATEN BANYUASIN

Oleh:
Rizki Salsabila

Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin telah akuntabel. Kondisi ini ditunjukkan dengan tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa telah akuntabel dan menerapkan prinsip partisipasi serta transparansi. Namun, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin masih disampaikan dengan media lisan pada saat musyawarah akhir tahun.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

Ketua,

Anggota,



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak

Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak

NIP. 195808281988101001

NIP. 198207032014042001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON FISCAL
YEAR 2017 IN SEMBAWA SUB-DISTRICT, BANYUASIN DISTRICT**

By:
Rizki Salsabila

This research aims to assess accountability in managing village funds in Sembawa sub-district, Banyuasin district. This research can be categorized as qualitative descriptive study with primary and secondary data. This research used interview and documentation as data collection technique and analyzed by using Miles and Huberman models. The result of this research indicate that the management of village funds in Sembawa subdistrict, Banyuasin district has been accountable. This condition is also supported by management of village fund, which start from planning stage until accountability stage, has been accountable and applies the principles of participation and transparency. However, the submission of this accountability report is still delivered with oral media on year end of village's meeting.

Keyword: *Accountability and Village Fund Management*

Chair,

Member,



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak

NIP. 195808281988101001



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198207032014042001

Acknowledge by.

Head of Accounting Department



Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak era reformasi, Indonesia telah menganut sistem pemerintahan desentralisasi, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Adanya desentralisasi ini, memberikan kesadaran betapa pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada potensi lokal (Syahadatina, 2017). Meskipun kebijakan yang ada saat ini masih menitikberatkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi, kemandirian tersebut harus dinilai dari level terendah pemerintahan yaitu desa. Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintahan dalam mencapai keberhasilan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang memiliki ruang lingkup pemerintahan yang lebih luas (Syahadatina, 2017). Hal ini dikarenakan desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh

karena itu diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan desa, yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang meliputi, pembinaan kemasayarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh dana desa dari APBN yang ditransfer melalui APBD pemerintah Kota/Kabupaten. Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp20,76 triliun. Anggaran Dana Desa tersebut selanjutnya akan dialokasikan ke desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk juga untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2015, Kabupaten Banyuasin menerima Pagu Dana Desa sebesar Rp80.574.536.000. Pada tahun 2016, Kabupaten Banyuasin menerima Pagu Dana Desa sebesar Rp180.639.025.000. Pada tahun 2017, Kabupaten Banyuasin menerima Pagu Dana Desa sebesar Rp230.005.921.000,00. Hal ini menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan Pagu Dana Desa di Kabupaten Banyuasin tiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan kesenjangan antar wilayah serta melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan (Situmorang: 2017).

Berikut ini tabel Pagu Dana Desa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin untuk tahun Anggaran 2017:

Tabel 1.1.
Pagu Dana Desa Tahun 2017

No	Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Banyuasin	Rp230.005.921.000,00
2	Kecamatan Sembawa	Rp8.619.954.225
3	Desa Mainan	Rp805.054.217
4	Desa Santan Sari	Rp772.995.628
5	Desa Limau	Rp801.373.028
6	Desa Rejodadi	Rp787.007.563
7	Desa Lalang Sembawa	Rp814.507.420
8	Desa Muara Damai	Rp776.975.442
9	Desa Pulau Harapan	Rp813.159.143
10	Desa Purwosari	Rp769.353.234
11	Desa Limbang Mulia	Rp759.418.460
12	Desa Sako Makmur	Rp757.896.660
13	Desa Pulau Muning	Rp762.213.430

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Dana Desa yang diberikan, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa tiap akhir tahun yang kemudian diserahkan kepada Bupati Banyuasin.

Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa antara lain akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan kita untuk mampu menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-

keputusan dan tindak perbuatan yang kita lakukan (Tasmara: 2006). Namun, meskipun perangkat desa dituntut untuk akuntabel dalam mengelola dana desa, masih tetap ada beberapa perangkat desa yang tidak menerapkan prinsip tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, misalnya kurangnya kualitas sumber daya yang mengelola Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Inspektorat Banyuasin, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil audit penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Banyuasin di lima desa yang ada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.

**Laporan Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun 2017-
Triwulan I 2018**

Nama Desa	Nomor dan Tanggal Laporan	Hasil Evaluasi
Desa Lalang Sembawa	700/ 143/ IRDA/ 2018 7 Juni 2018	Terdapat pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp13.500.000
Desa Limbang Sembawa	700/ 145/ IRDA/ 2018 7 Juni 2018	Terdapat belanja Alokasi Dana Desa yang melampaui tahun anggaran sebesar Rp23.572.000
Desa Pulau Muning	700/ 78/ IRDA/ 2018 30 Mei 2018	Penggunaan Dana Desa dan ADD tahun 2017 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa Pulau Muning, Kecamatan Sembawa agar SILPA ADD Tahun 2017 sebesar Rp.20.475.500 dianggarkan kembali sesuai peruntukannya pada APBDesa

		Pulau Muning, Kecamatan Sembawa Tahun Anggaran 2018.
Desa Purwosari Sembawa	700/ 77/ IRDA/ 2018 30 Mei 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 belum ditetapkan
Desa Santansari Sembawa	700/ 72/ IRDA/ 2018 21 Mei 2018	Terdapat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp301.186.528

Sumber: Laporan Hasil Audit Inspektorat Banyuasin

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai akuntabilitas Perangkat Desa yang mengelola Dana Desa. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2016). Penelitian Rustiarini (2016) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisien dan ekonomis. Mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintah pusat. Hasil penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2016). Fenomena yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah Dana Desa yang dialokasikan, peruntukkan dan penggunaannya tidak untuk membiayai program-program pembangunan desa. Akibatnya berimplikasi terhadap belum terpenuhinya maksud pemerintah pusat dan harapan masyarakat desa agar infrastruktur desa lebih tersedia dan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2015 belum optimal dan tidak sesuai peruntukkannya sehingga hasilnya tidak

memenuhi harapan masyarakat. Akuntabilitas penggunaan dana desa belum optimal berdasarkan dimensi transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan responsivitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian replikasi yang merujuk pada penelitian Hidayah dan Wijayanti, (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo). Perbedaan antara penelitian Hidayah dan Wijayanti, (2017) dengan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya meneliti pengelolaan dana desa di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian ini meneliti pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Perbedaan lainnya adalah tahun anggaran yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran 2016 sedangkan penelitian ini meneliti tahun anggaran 2017.

Dari penjelasan di atas dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama namun dengan wilayah penelitian yang berbeda. Peneliti memilih Kecamatan Sembawa yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan mengambil beberapa desa di Kecamatan Sembawa sebagai objek penelitian. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu administrasi keuangan, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi Pemerintah Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Objek Penelitian

Desa-desanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Desa Lalang Sembawa

2. Desa Limbang Mulya
3. Desa Pulau Muning
4. Desa Purwosari
5. Desa Santansari

Dari lima desa tersebut, maka akan dipilih beberapa informan penting yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan Dana Desa. Kriteria yang diambil untuk pemilihan informan ini antara lain (Setiana dan Yuliani: 2017):

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi Kesra, dan kepala dusun.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.
3. Masyarakat desa yang dianggap memahami makna akuntabilitas.
4. Masyarakat desa yang sering berpartisipasi dalam rapat desa.

1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa. Desa-desanya di Kecamatan Sembawa dipilih sebagai objek penelitian ini.

1.5.3. Rancangan Penelitian

Rancangan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan model analisis Miles dan Huberman, dimana model ini menjelaskan dalam menganalisa melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, data *display*, dan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumen-dokumen terkait Dana Desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.

1.5.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan dua sumber data, yakni: data primer dan data sekunder. Menurut (Sekaran dan Bougie: 2017) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi, sedangkan data sekunder adalah mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada sampel yang dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin yang telah dipilih sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2017.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014).

Metode wawancara yang digunakan dapat memberikan peluang bagi responden untuk menjawab secara terbuka tanpa dibatasi dengan jawaban yang disediakan oleh peneliti. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas yang sudah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2000) dalam (Fitrah dan Luthfiyah: 2017), metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, *raport*, *ledger* dan sebagainya.

Dengan metode dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.

1.5.6. Teknik Analisis Data

Menurut (Fossey, cs, 2002) dalam (Yusuf, 2014), menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data, dan kesimpulan/verifikasi.

Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Yusuf, 2014) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti: *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis

sebelum digunakan. Lebih jauh Miles dan Huberman (1984) dalam (Yusuf: 2014) mengemukakan tentang kegiatan analisa data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Dalam penelitian ini, hasil observasi lapangan dan wawancara di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin akan dikumpulkan yang kemudian digolongkan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).

2. Data *Display*

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat data *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

Dengan menggunakan data *display*, informasi yang telah didapat dari wawancara dan dokumentasi di desa-desa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin dapat tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan sehingga, penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang diperoleh.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian.

Di samping itu perlu pula diingat antara reduksi data-*display* data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan *display* data saling berhubungan timbal balik. Demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi; serta antara *display* data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan kata lain, pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari *display* data. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang

lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

Dengan menarik kesimpulan, kesimpulan yang sebelumnya belum jelas dapat lebih terinci dan membantu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dibahas, maka akan dikemukakan sistematis penulisan yang terdiri dari lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan terkait teori utama, pengertian desa, konsep akuntabilitas, dana desa, penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian

BAB III: Gambaran Umum Desa

Pada bab ini akan dijelaskan terkait profil desa, visi dan misi desa, struktur organisasi desa, dan program kegiatan dana desa.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait hasil dari wawancara penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dijelaskan terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, A. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto), 5.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Kecamatan dan Desa* (1st ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Bpkad Banjar. (2017). Dimensi Akuntabilitas. Retrieved April 12, 2019, from <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/05/dimensi-akuntabilitas/>
- Candra, N. (2015). Indikator Akuntabilitas. Retrieved February 16, 2019, from <http://noviandycandra.blogspot.com/2015/06/indikator-akuntabilitas.html>
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (1st ed.). Bima: CV. Jejak. Retrieved from www.books.google.co.id
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI*, 2.
- Jamaluddin, Y. (2016). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., & Allo, E. L. (2015). "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Makalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 19.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017. (2017).

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Banyuasin. (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. (2016).

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (2014).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (n.d.).

Rahayu, P. A., & Fettry, S. (2017). Relevansi Akuntabilitas terhadap Efektivitas Program Dana Desa. *Media Riset Akuntansi*, 7.

Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa.

Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar), 3.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*.

Situmorang, A. P. (2017, August 19). Ini Alasan Pemerintah Jokowi Terus Tambah Jumlah Dana Desa Tiap Tahun. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-pemerintah-jokowi-terus-tambah-jumlah-dana-desa-tiap-tahun.html>

Soemarwoto, S. (2018). *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita*. Yogyakarta: Deepublish.

Solihin, D. (2006). Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparans, Partisipatif, dan Akuntabel.

- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DEsa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal AKuntansi Dan Investasi*, 2(1), 1–18.
- Tasmara, T. (2006). *Spiritual Centered Leadership*. Jakarta: Gema Insani Press. Retrieved from www.books.google.co.id
- Tim SAKIP. (2000). *Akuntabilitas*. Jakarta: BPKP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014), (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (2015).
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, 17).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Pertama). Jakarta: Kencana. Retrieved from www.books.google.co.id
- Zoelisty, C., & Adityawarman. (2014). Amanah sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–12.